

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA

THE POVERTY REDUCTION EFFORTS OF KEBUMEN REGENCY GOVERNMENT THROUGH TOURISM SECTOR

Dias Endar Pratama

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

Diaspratama60@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini diangkat berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, dengan subjek penelitian yaitu: Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata meliputi; (1) program pengembangan desa wisata; dan (2) program pengembangan destinasi wisata. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata diantaranya meliputi; (1) kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, (2) keterbatasan anggaran dana; (3) kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Kata kunci: *Pemerintah Kabupaten Kebumen, pengentasan kemiskinan, sektor pariwisata*

ABSTRACT

The research was aimed to describe the poverty reduction efforts of Kebumen Regency Government through tourism sector. It was also aimed to describe the obstacles faced by the Government in poverty reduction efforts through tourism sector. This was descriptive research using qualitative approach. Purposeive technique was deployed for Informant selection. The subject of this research included the Head of Tourism Development and the Head of Tourism Resources Development Section. The data were collected through interview and documentation techniques. Cross Check technique was employed to gain data validity. Data analysis used inductive data analysis, including data reduction, data display and conclusion. The results showed that the poverty reduction efforts of Kebumen Regency Government through tourism sector included; (1) tourism village development program; and (2) tourism destination development program. The obstacles faced by Kebumen Regency Government in poverty reduction through tourism sector included; (1) lack of human resources (HR), (2) budget constraints; (3) lack of locals' support in tourism development.

Keywords: Kebumen Regency Government, poverty reduction, tourism sector

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian yang harus dicarikan solusi untuk mengentaskannya. Kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja karena merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk, 2008:27). Pentingnya masalah kemiskinan untuk segera diatasi berkaitan dengan pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwasanya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam rangka pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sasaran utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial adalah setiap warga negara yang terkategori mengalami masalah kesejahteraan sosial, yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi. Selanjutnya upaya mengatasi masalah kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengatasi masalah kemiskinan yang berupa pembentukan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah.

Sejak diberlakukannya undang-undang tentang penanganan fakir miskin, pemerintahan pusat maupun daerah telah mengulirkan berbagai program di masyarakat sebagai upaya mengatasi kemiskinan, baik yang bersifat bantuan maupun pemberdayaan. Namun secara umum belum diketahui bagaimana program-program kemiskinan tersebut berjalan dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh penerima program (Tukiran dkk, 2010: 81).

Terkait dengan persoalan kemiskinan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam memecahkan persoalan kemiskinan. Hal ini

dikarenakan sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan (Yoeti, 2008: 14). Beberapa kontribusi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata seperti lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah, mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (I Putu Anom, 2010: 4).

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Indonesia yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia cenderung masih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 10,96%. Kemudian pada tahun 2015 persentase kemiskinan penduduk di Indonesia meningkat mencapai 11,13%.

Selanjutnya pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Indonesia sedikit menurun menjadi 10,7% (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> diakses pada 16 Agustus 2017).

Pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sedikit banyak menyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Dari tujuh provinsi yang berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi pertama sebagai provinsi dengan persentase angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2016 yakni mencapai 13,19%. Kemudian posisi dua sampai dengan tujuh ditempati oleh Provinsi DIY dengan persentase kemiskinan sebesar 13,1%, Provinsi Jawa Timur 11,85%, Provinsi Jawa Barat 8,77%, Provinsi Banten 5,36% dan Provinsi DKI Jakarta dengan persentase kemiskinan hanya 3,75% (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219> diakses pada 16 November 2016).

Sebagai Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, perlu

dilihat kondisi kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Lima Kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Wonosobo dengan persentase kemiskinan sebesar 20,53%, disusul oleh Kabupaten Kebumen yang menempati peringkat dua dengan persentase kemiskinan sebesar 19.86 %. Kemudian Kabupaten Brebes, Purbalingga, dan Rembang menempati peringkat tiga sampai lima dengan masing-masing angka kemiskinan sebesar 19,47%. 18,98%, dan 18,54% (<http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1386> diakses pada 16 Agustus 2017).

Data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan penduduk Kabupaten Kebumen masih tinggi. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Kebumen berada di bawah Kabupaten Wonosobo, tetapi jika dilihat dari sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang PAD maka seharusnya dengan adanya sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tidak terlalu tinggi. Hal ini karena objek pariwisata di Kabupaten Kebumen jenisnya lebih beragam dibanding Kabupaten Wonosobo. Dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo

hanya memiliki 7 (tujuh) objek wisata yang terdiri dari jenis wisata alam dan buatan. Beberapa objek wisata Kabupaten Wonosobo diantaranya adalah Dataran Tinggi Dieng, Telaga Menjer, Makam Surodilogo, Lembah Dieng, Gelanggang Renang Mangli, Pemandian Kalianget, dan Waduk Wadaslintang. Sedangkan Kabupaten Kebumen memiliki berbagai macam objek wisata, seperti:

- a. Wisata pantai: Pantai Petanahan, Pantai Suwuk, Pantai Karangbolong, Pantai Menganti, Pantai Logending, Pantai Lampon
- b. Wisata Goa: Goa Jatijajar, Goa Petruk, dan Goa Barat
- c. Wisata sejarah: Benteng Van der wijk
- d. Wisata waduk: Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang
- e. Wisata Air Panas: Pemandian Air Panas (PAP) Krakal
- f. Wisata Pendidikan: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonsia (LIPI) Karangsambung, Hutan Mangrove dan Kampung Wisata Inggris Kebumen.

Apabila memperhatikan beragamnya objek wisata tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki potensi wisata yang menjanjikan dan apabila dikembangkan dengan baik tentu akan meningkatkan pendapatan daerah yang

secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait dengan kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Nizal Athfal Anis tahun 2015 yang berjudul “Dampak Objek Wisata Alam Jembangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat yang Bekerja di Sektor Pariwisata Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen”. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa terjadi perubahan sosial masyarakat Desa Jembangan berkaitan dengan mata pencaharian yang sebelumnya sebagian besar bekerja sebagai petani (47,71%), kemudian sesudah dibukanya sektor pariwisata (2011-2015) masyarakat sebagian besar bekerja sebagai penjual makanan dan minuman (61,344%). Selain itu, juga terjadi perubahan ekonomi dimana ada peningkatan rata-rata pendapatan perbulan sebelum dan sesudah bekerja di sektor pariwisata sebesar Rp. 75.000,-

Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila pemerintah daerah lebih serius

dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kebumen maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat yang ujungnya akan mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Adanya potensi wisata yang menjanjikan di Kabupaten Kebumen tentu cukup mengherankan bila melihat fakta bahwa pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen menempati peringkat kedua di Jawa Tengah. Sebab seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memanfaatkan potensi pariwisatanya secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu mendeskripsikan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi

pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2017 di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan terhadap sektor pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Penentuan subjek penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Berdasarkan teknik tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan teknik *cross check*. data yang telah ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan *cross check* dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi.

Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif, yakni permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Proses analisis data sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 247-253), yakni melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Selanjutnya disebut Disporawisata) selaku bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen telah melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yakni pengembangan sektor pariwisata. Adapun sektor pariwisata dikembangkan salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih tinggi. Terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata yakni dengan pengembangan desa wisata dan pengembangan destinasi wisata.

1. Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai berbagai karakteristik dan kekhasan khusus yang dapat menjadi tujuan pariwisata. Merujuk pada jenis-jenis pariwisata menurut James J Spillane (2001: 28-31), bahwasannya desa wisata masuk kedalam jenis pariwisata untuk rekreasi dan pariwisata untuk kebudayaan. Sebagai pariwisata untuk rekreasi, desa wisata memberikan tempat yang nyaman dan tenang yang sangat cocok untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian sebagai desa pariwisata untuk kebudayaan, desa wisata memberikan berbagai atraksi kebudayaan dan adat-istiadat yang ada di desa tersebut sehingga memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai kebudayaan bagi para wisatawan.

Kemudian berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan desa wisata ini termasuk ke dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. masyarakat dituntut untuk mampu mengembangkan potensi

daerahnya dan terlibat dalam pembangunannya.

Dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata, pengembangan desa wisata mencakup pelibatan masyarakat dalam pengembangan/pengelolaan dan perluasan kesempatan usaha baru. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini terlihat pada pengelolaannya yang semua diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis) dimana anggota-anggota pokdarwis tersebut adalah warga masyarakat desa wisata itu sendiri. Pokdarwis dibentuk oleh kesadaran masyarakat sendiri dan dibentuk atas inisiasi dari Disporawisata. Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata akan menjadikan masyarakat mampu bernegosiasi dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata.

Kemudian pelibatan masyarakat juga dapat memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesempatan kerja terutama bagi warga miskin sehingga dapat mengentaskan kemiskinan yang merupakan salah satu tujuan pariwisata. Dengan adanya desa wisata masyarakat mendapat peluang

usaha baru untuk meningkatkan perekonomian seperti penjualan berbagai cenderamata, penyewaan tempat istirahat atau *homestay*. Kemudian kesempatan kerja masyarakat sekitar juga akan meningkat, seiring kedatangan para wisatawan yang tentunya membutuhkan berbagai akomodasi seperti makanan, minuman, oleh-oleh, transportasi, penyewaan berbagai alat dan *tour guide*. Kontribusi penting lain dari pengembangan desa wisata yakni akan menambah pemasukan untuk desa yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pengembangan Desa Wisata mulai digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2011 dengan Desa Wisata Jembangan sebagai pelopornya. Pembukaan Desa Wisata Jembangan tidak diduga mampu menarik cukup banyak wisatawan untuk berkunjung, meski kebanyakan masih wisatawan dari Kabupaten Kebumen dan daerah lain yang berdekatan seperti Wonosobo, Purworejo, maupun Banjarnegara. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung telah membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Desa Jembangan untuk memaksimalkan sektor pariwisata sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Keberhasilan Desa Wisata Jembangan kemudian membuat daerah lain termotivasi untuk ikut membentuk pokdarwis secara mandiri guna menggali potensi yang ada di desa yang nantinya dapat berkembang menjadi desa wisata. Selain itu, Disporawisata juga semakin gencar dalam menggali potensi-potensi pariwisata yang ada di desa. Sampai saat ini di Kabupaten Kebumen terdapat 22 desa wisata di 14 Kecamatan. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata, Disporawisata Kabupaten Kebumen berperan dalam melakukan pembinaan dan promosi.

a. Pembinaan

Disporawisata secara berkala dan berkelanjutan melakukan pembinaan kepada pokdarwis selaku pengurus desa wisata yang dilaksanakan pada hari Selasa minggu kedua setiap bulannya. Tempat pelaksanaan pembinaan bergantian pada setiap desa wisata, namun untuk awal tahun pembinaan diadakan di kantor Disporawisata Kabupaten Kebumen. Sistem pembinaan tersebut disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari pokdarwis itu sendiri. Fokus utama pembinaan ini adalah peningkatan usaha di bidang pariwisata dan pengelolaan desa wisata.

Pembinaan terhadap peningkatan usaha di bidang pariwisata dilakukan untuk

mendorong masyarakat membuka usaha di bidang pariwisata, baik itu usaha dagang maupun usaha jasa. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar desa wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya yang nantinya akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya pembinaan terhadap pengelolaan desa wisata sangat bergantung kepada kesiapan dan dukungan masyarakat itu sendiri. Hal ini karena masyarakat, baik sebagai pengelola maupun sebagai pelayan akan bersinggungan langsung dengan para wisatawan. Pembinaan kepada pokdarwis selaku pengelola desa wisata yang dilakukan oleh Disporawisata meliputi manajemen pengelolaan yang baik, pemanfaatan potensi wisata secara bijak, pengelolaan limbah, penataan ruang, dan pengadaan sarana dan prasara.

b. Promosi

Disporawisata melakukan promosi desa wisata dengan mengadakan festival desa wisata tanggal 20 dan 21 Mei 2017 yang bertempat di alun-alun Kabupaten Kebumen dan pendopo rumah dinas Bupati. Festival desa wisata tersebut diikuti 18 desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen.

Festival desa wisata terbagi dalam dua bagian acara, tanggal 20 Mei 2017

diadakan acara pameran desa wisata, yakni setiap desa wisata menampilkan potensi, kekhasan dan konsep desa wisata yang dikembangkan kepada para pengunjung acara tersebut. Kemudian tanggal 21 Mei 2017 para peserta festival desa wisata diharuskan mempresentasikan di depan para juri mengenai potensi desanya, apa yang menjadi nilai jual, kekhasan desanya, bagaimana pengelolaan desa wisatanya, program selanjutnya guna pengembangan desa wisatanya, bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah, serta kendala dalam pengelolaan maupun pengembangannya.

Tujuan diadakannya festival desa wisata tersebut adalah untuk mempromosikan desa wisata kepada masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain itu dengan adanya festival desa wisata ini, para peserta dapat memperoleh manfaat terutama dalam segi pengelolaan dan program kedepannya. Para peserta dapat mengukur sendiri bagaimana kesiapan desanya apabila dibandingkan dengan desa wisata yang lain.

2. Pengembangan Destinasi Wisata

Pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu upaya dari Disporawisata untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen.

Disporawisata sendiri dalam pengembangan destinasi wisata hanya mencakup 9 (sembilan) objek wisata. Kesembilan objek wisata tersebut meliputi Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Goa Jatijajar, Pantai Logending, Goa Petruk, dan Pemandian Air Panas (PAP) Krakal. Pengembangan destinasi wisata oleh Disporawisata memfokuskan pada peningkatan infrastruktur di objek wisata dan pelibatan masyarakat dalam kepariwisataan.

a. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh Disporawisata meliputi pengadaan sarana objek wisata dan peningkatan prasarana objek wisata.

1) Pengadaan sarana objek wisata

Peningkatan sarana objek wisata oleh Disporawisata terwujud dengan pengadaan berbagai alat pendukung kegiatan kepariwisataan seperti peralatan keselamatan alat susur goa di objek wisata Goa Jatijajar dan Goa Barat serta pengadaan kapal wisata dan jet ski di objek wisata Pantai Logending. Pengadaan sarana alat susur goa di objek wisata Goa Jatijajar dan Goa Barat telah membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pemandu wisata. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk dapat memperoleh

pekerjaan baru maupun tambahan penghasilan dengan ikut menjadi pemandu wisata.

2) Peningkatan prasarana di objek wisata

Disporawisata dalam memfokuskan peningkatan prasarana pada pembangunan prasarana baru maupun perbaikan prasarana yang telah rusak. Adapun peningkatan prasarana yakni seperti pembangunan pasar wisata dan taman di objek wisata Goa Jatijajar, pembangunan gerbang masuk dan taman di objek wisata Pantai Logending, dan pembangunan warung, taman, serta fasilitas bermain anak di objek wisata Pantai Karangbolong.

Pembangunan pasar wisata tersebut juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pasar wisata yang terdiri dari 42 kios pedagang di Goa Jatijajar telah membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, terutama untuk perempuan atau ibu-ibu di desa yang tidak bekerja. Dengan adanya pasar wisata ini para perempuan yang sebelumnya tidak bekerja kini sudah punya pendapatan untuk meningkatkan perekonomian.

b. Pelibatan masyarakat

Selain peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan destinasi wisata juga mencakup pelibatan masyarakat dalam kepariwisataan. Adapun keterlibatan

masyarakat dalam kepariwisataan di Kabupaten Kebumen yakni dengan menjadi Buruh Tak Terlatih (BTT), Mas dan Mbak Duta Wisata, dan ikut dalam komunitas pariwisata.

1) Buruh Tak Terlatih (BTT)

Pengelola pada setiap objek wisata berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) kepala pengelola dan 5 (lima) staf. Untuk membantu tugas pengelola yang hanya 6 (enam) orang tersebut, maka Disporawisata mempekerjakan masyarakat sekitar objek wisata sebagai buruh tak terlatih (BTT) yang berjumlah 5 (lima) orang. Tugas utama dari BTT ini adalah membantu pengelolaan di objek wisata terutama untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di objek wisata. Pelibatan BTT tersebut selain untuk membantu tugas pengelola objek wisata, juga sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar.

2) Mas dan Mbak Duta Wisata

Disporawisata terus mendorong partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan dengan mengadakan pemilihan Mas dan Mbak duta wisata yang bertugas sebagai agen perubahan, pelopor atau penggerak kesadaran pariwisata di Kabupaten Kebumen. Banyak *event-event* pariwisata di luar Kebumen yang diikuti oleh Mas dan

Mbak duta wisata sebagai upaya untuk mempromosikan pariwisata di Kebumen.

Duta wisata menjadi pelopor dibukanya Wisata Pentulu Indah di Karanggayam dan Bukit Langit di Karanganyar. Hal ini patut diapresiasi, sebab dengan dibukanya objek wisata Pentulu Indah diharapkan dapat meningkatkan peluang usaha masyarakat sehingga mampu mengurangi kemiskinan mengingat angka kemiskinan Kecamatan Karanggayam paling tinggi di antara Kecamatan lain di Kabupaten Kebumen.

3) Komunitas Pariwisata

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan dengan ikut dalam berbagai komunitas-komunitas pariwisata Kebumen seperti Kebumen Memotret, Kebumen Keren, dan Plesir Kebumen. Komunitas pariwisata akan membantu mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Kebumen, terutama melalui media sosial. Promosi pariwisata cukup penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang berwisata, tentu uang yang dibelanjakan semakin banyak sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan destinasi wisata yang baik dan terencana akan mampu mencapai

tujuan kepariwisataan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Cooper (dalam Maharani Tri Astuti dan Any Ariani Noor, 2016: 26), untuk mencapai destinasi wisata yang baik setidaknya harus memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- 1) Atraksi (*attraction*), merupakan produk utama dari sebuah destinasi, atau singkatnya apa yang dijual oleh sebuah destinasi wisata tersebut.
- 2) Aksesibilitas (*accessibility*), berhubungan dengan sarana dan prasarana untuk memudahkan para wisatawan untuk menuju lokasi destinasi wisata.
- 3) Amenitas (*amenity*), merupakan segala fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.
- 4) Ancilliary adalah pengelola yang mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan terkait keberadaan destinasi wisata.

Terkait pengembangan destinasi wisata yang dilakukan oleh Disporawisata setidaknya mampu memenuhi tiga dari empat unsur destinasi wisata, yakni atraksi, amenitas, dan ancilliary. Pengembangan destinasi wisata oleh Disporawisata memenuhi unsur atraksi, dimana destinasi wisata di Kabupaten Kebumen mempunyai keindahan yang khas dan mengagumkan.

Unsur amenitas juga sudah terpenuhi dengan adanya warung, tempat istirahat, toilet, tempat ibadah, dan tempat belanja untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selanjutnya unsur ancilliary terpenuhi dimana Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Disporawisata yang menjadi pengelola destinasi wisata mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan terkait destinasi wisata. Sementara itu unsur aksesibilitas belum mampu dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen karena akses jalan menuju destinasi wisata belum tertata dengan baik.

Pengembangan destinasi wisata mampu memberikan kontribusi terhadap usaha percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan memberikan lapangan pekerjaan dan usaha baru di bidang pariwisata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan destinasi wisata termasuk kedalam kelompok program penanggulangan kemiskinan secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata

Meskipun berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata telah dilakukan oleh Disporawisata Kabupaten Kebumen namun upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan Disporawisata menemui berbagai hambatan dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya SDM di tingkat Disporawisata sendiri maupun di tingkat pengelola objek wisataterletak pada kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari segi kualitas, kurangnya sumber daya manusia terlihat pada kurangnya tenaga ahli di bidang pariwisata yang dimiliki oleh Disporawisata. Kemudian dari segi kuantitas kurangnya SDM yang dimiliki oleh Disporawisata terlihat pada minimnya jumlah pengelola yang ada pada objek wisata. Satu objek wisata hanya dikelola oleh 5 sampai 6 pengelola dari Disporawisata yang dibantu oleh 5 sampai 6 dari masyarakat sekitar

sebagai Buruh Tak Tetap (BTT). Sementara itu seharusnya objek wisata dikelola oleh minimal 10 orang yang juga berperan sebagai tenaga keamanan.

Kurangnya sumber daya manusia yang ada baik dari segi kaulitas maupun kuantitas tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap lambannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Kebumen. Apabila pengembangan pariwisata di Kabupaten Kebumen berjalan lambat maka pengentasan kemiskinan yang diharapkan sebagai salah satu *multiplayer effect* dari pariwisata akan sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Kurangnya anggaran dana

Kurangnya anggaran dana dari Pemda Kabupaten Kebumen berpengaruh terhadap perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata serta peningkatan pelayanan terhadap para wisatawan. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana menjadi agak terhambat dengan kurangnya anggaran dana. Banyak objek wisata di Kabupaten Kebumen yang sarana dan prasarananya masih belum memadai, seperti di Pemandian Air Panas (PAP) Krakal yang lahan parkirnya sempit dan sarana bermain anak banyak yang sudah rusak.

Dalam rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang Disporawisata) tahun 2016, anggaran untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebesar Rp 500.000.000,-. Akan tetapi yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang Disporawisata) sekitar Rp 300.000.000,-.

3. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Sinergitas antar stakeholder pariwisata akan berkontribusi cukup besar dalam mencapai tujuan pengembangan kepariwisataan. Bentuk sinergitas antar stakeholder pariwisata tersebut dapat berupa saling memberi masukan dan evaluasi terhadap kebijakan yang akan atau sedang dilaksanakan dalam pengembangan maupun pengelolaan pariwisata. Salah satu stakeholder yang berhubungan dengan upaya tersebut tentu saja adalah masyarakat sekitar objek wisat yang nantinya akan mendapat manfaat dari adanya kegiatan wisata di daerahnya.

Namun masih banyak ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pola pikir masyarakat masih lebih mementingkan *profit instan* daripada *profit jangka panjang*, adanya aksi premanisme

seperti di Pantai Petanahan, pola pikir masyarakat yang masih beranggapan pada mendapat keuntungan hanya dari penjualan tiket (*ticket oriented*), adanya gejolak pada sebagian masyarakat yang tidak mendukung pengembangan wisata, ada desa yang mengembangkan desa wisatanya hanya karena ingin bantuan berupa pembangunan fisik di desanya (*proyek oriented*), dan sebagian masyarakat masih belum mampu membaca peluang usaha yang timbul dengan adanya kegiatan pariwisata di daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata yakni upaya pengembangan desa wisata dan pengembangan destinasi wisata.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya anggaran dana, dan Kurangnya dukungan

dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Saran

1. Meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas bagi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata serta kepada pengelola dan pelaku usaha di sektor pariwisata.
2. Perlunya program/kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang secara spesifik mampu mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata, seperti pembinaan yang dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.
3. Perlunya kerjasama antar dinas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- <http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1386> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
- <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
- <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
- I Putu Anom. 2010. *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global: Pembangunan*

- Kepariwisata Berkelanjutan*. Bali: Udayana University Press.
- James J. Spillane. 2001. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Nasir, dkk. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Eksekutif Vol. 5 No. 2, Agustus 2008.
- Maharani Tri Astuti dan Any Ariani Noor, 2016. *Daya Tarik Morotai Sebagai Destinasi Wisata Dan Bahari*. Jurnal Kepariwisata Indonesia Vol 11 No. 1, Juni 2016.
- Oka A Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tukiran, Agus Joko Pitoyo, Pande Made Kutanegara. 2010. *Akses Penduduk Miskin Terhadap Kebutuhan Dasar*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.